

*DSAS Terkini merupakan ringkasan Tim Teknis atas hasil pembahasan dalam rapat-rapat DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini memberikan informasi umum mengenai keputusan sementara dari DSAS IAI. Keputusan final DSAS IAI dilakukan melalui serangkaian tahapan penyusunan standar akuntansi keuangan (due process procedure) yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI. Keputusan final DSAS IAI tersebut dipublikasikan dalam bentuk PSAK, ISAK, dan Buletin Implementasi.*

## Daftar Topik

- 1 Penurunan nilai
- 2 Penurunan nilai SAK EP
- 3 Asuransi syariah
- 4 Lindung nilai melalui bursa komoditi syariah
- 5 Sosialisasi
- 6 Progres program kerja 2024

## 1. PENURUNAN NILAI

### a Pengesahan PSAK 413: Penurunan Nilai

Pada 24 Juli 2024 DSAS IAI telah mengesahkan PSAK penurunan nilai untuk instrumen keuangan syariah, yaitu PSAK 413: Penurunan Nilai, yang meliputi penurunan nilai atas aset keuangan syariah dan pembentukan provisi kafalah penjaminan risiko kredit. PSAK 413 berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dan dapat diterapkan dini serta dirancang bagi entitas yang menerapkan SAK Indonesia. Standar ini merupakan fase pertama standar penurunan nilai untuk aset yang muncul dari transaksi berbasis syariah.

PSAK 413 menggunakan konsep ekspektasi kerugian (*expected loss*) yang mensyaratkan pembentukan penyisihan untuk ekspektasi kerugian penurunan nilai. Perhitungannya mencerminkan jumlah tidak bias dan probabilitas tertimbang (*unbiased and probability-weighted amount*) dan informasi wajar dan tersokong (*reasonable and supportable information*), serta tidak mencerminkan nilai waktu atas uang (*time value of money*).

# DSAS TERKINI



Sebelum menerbitkannya DSAS IAI memaparkan pokok pengaturan PSAK 413 kepada DSN MUI pada 14 Agustus 2024 di kantor DSN MUI Menteng Jakarta. Dalam pertemuan tersebut kedua pihak melakukan diskusi mendalam mengenai berbagai aspek kesyariahan yang terkandung dalam standar tersebut, serta dampaknya terhadap entitas keuangan syariah dan entitas lain. DSN MUI menyampaikan surat pernyataan kesesuaian syariah nomor surat U-0590/DSN-MUI/VIII/2024 tertanggal 26 Agustus 2024.

## **b** Penghentian ISAK 403: Penurunan Nilai

DE PSAK 413 diterbitkan berbarengan dengan DE ISAK 403: Penurunan Nilai yang merupakan standar antara (*bridging standards*) menuju fase kedua standar penurunan nilai untuk aset berbasis syariah. Ruang lingkupnya adalah aset mudharabah dan musyarakah. Saat finalisasi PSAK 413 DSAS IAI memutuskan untuk menghentikan penyusunan ISAK 403 dan memasukan substansi pengaturan DE ISAK 403 ke dalam revisi PSAK 459: Akuntansi Perbankan Syariah.

PSAK 413 yang telah disahkan DSAS IAI dan berlaku pada 1 Januari 2027 telah tersedia dan dapat diakses secara daring melalui aplikasi SAK Online.

## **2. PENURUNAN NILAI SAK EP**

DSAS IAI sudah memulai penyusunan PSAK 414 tentang penurunan nilai atas aset keuangan berbasis syariah bagi entitas yang menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP). Ruang lingkup PSAK 414 adalah aset keuangan syariah yang berupa hak untuk menerima kas yang jumlah dan waktunya telah ditentukan dalam akad (*contractual rights*). Aset keuangan syariah tersebut merupakan aset keuangan syariah yang bersifat dasar (*basic financial assets*). Konsep penurunan nilai yang akan digunakan dalam PSAK 414 adalah *incurred loss* tanpa nilai waktu atas uang (*time value of money*).

### 3. ASURANSI SYARIAH

Pokja PSAK 408 yang melibatkan asosiasi dan industri asuransi syariah, regulator, DSN MUI, dan akuntan publik melakukan pembahasan lanjutan pada 27 Agustus 2024 di Grha Akuntan IAI Menteng Jakarta. Pertemuan ini mengidentifikasi dan membahas secara mendalam isu akuntansi asuransi syariah. Isu tersebut muncul dari isu yang teridentifikasi saat penyusunan PSAK 408 (2016), permasalahan praktik yang belum ada saat penyusunan PSAK 408 (2016), dan ketentuan fatwa terbaru DSN MUI seperti Fatwa 81, Fatwa 148, dan Fatwa 155. Pokja ini bertujuan adalah memberikan rekomendasi poin revisi PSAK 408.



### 4. LINDUNG NILAI MELALUI BURSA KOMODITI SYARIAH

Pada Juli 2024 DSAS IAI menerima pertanyaan dari Bursa Berjangka Komoditi & Derivatif (ICDX) terkait akuntansi transaksi lindung nilai pada bursa komoditi syariah. Dua kali pertemuan pada 8 dan 12 Agustus 2024 antara DSAS IAI dengan ICDX, DEKS Bank Indonesia, Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA) di Grha Akuntan IAI Menteng Jakarta. DSAS IAI masih melakukan pembahasan mengenai isu akuntansi tersebut.



## 5. SOSIALISASI

### a PSAK Syariah for Academics

Salah satu program kerja DSAS IAI adalah meningkatkan pemahaman publik terhadap PSAK dan ISAK Syariah termasuk kepada akademisi. “PSAK Syariah for Academics” merupakan kegiatan sosialisasi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman akademisi atas konsep dan penerapan PSAK Syariah dalam praktik. Acara ini berlangsung secara serial sejak tahun 2023. Pada kuartal ketiga tahun 2024 DSAS IAI telah melakukan sosialisasi seri keenam tentang musyarakah mutanaqishah di perbankan syariah pada 28 Agustus 2024 dengan narasumber M. Gunawan Yasni (DSAS IAI), Hidayatul Ihsan (KASy IAI), dan Agung Bayu (praktisi perbankan syariah). Acara ini diikuti sekitar 450 orang secara daring. Rekaman atas acara tersebut dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/DSAS-MMQ>.



### b Penerapan SAK EP pada BPR Syariah

OJK Perbankan Syariah melakukan diskusi kelompok terfokus “Penerapan SAK EP pada BPR Syariah” pada 25 Juli 2024 di Hotel The Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta. Bapak Yasir dan Bapak Yakub, Ketua DSAS IAI dan Direktur Standar dan Praktik Keprofesian IAI menjadi narasumber dalam FGD terkait penerapan SAK EP pada BPR Syariah yang akan efektif pada 1 Januari 2025. FGD yang dilakukan secara hibrida juga dihadiri pimpinan perwakilan BPR Syariah dari seluruh Indonesia.



## 6. PROGRES PROGRAM KERJA 2024

Secara umum capaian program kerja penyusunan PSAK pada kuartal III tahun 2024 adalah:

Program	PSAK	Keterangan	Status	Target
Penurunan nilai (fase 1)	Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan nilai untuk aset keuangan syariah bersifat dain dan pembentukan provisi kafalah bagi entitas yang menerapkan SAK Indonesia</li> <li>Konsep yang digunakan adalah <i>expected loss</i></li> </ul>	PSAK 413 telah disahkan pada Juli 2024	-
Penurunan nilai bagi entitas menerapkan SAK EP	Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan nilai untuk aset keuangan syariah bersifat dain bagi entitas yang menerapkan SAK EP</li> <li>Konsep yang digunakan adalah <i>incurred loss</i></li> </ul>	Pembahasan substansi pokok pengaturan standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>ED PSAK di triwulan keempat tahun 2024</li> <li>PSAK di triwulan pertama tahun 2025</li> </ul>
Wakalah investasi	Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wakalah dengan penyerahan dana dari muwakil ke wakil untuk diinvestasikan</li> <li>Akuntansi entitas muwakil dan entitas wakil</li> </ul>	Pembahasan substansi pokok pengaturan standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>ED PSAK di triwulan pertama tahun 2025</li> <li>PSAK di triwulan kedua tahun 2025</li> </ul>
Asuransi syariah	Revisi	Isu akuntansi di asuransi syariah yang belum dan sudah diatur dalam standar	Identifikasi isu standar akuntansi asuransi syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar isu akuntansi di November 2024</li> <li>Proses penyusunan revisi PSAK 408 mulai di akhir tahun 2024</li> </ul>
Sukuk	Revisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akuntansi sukuk yang mencakup ragam akad</li> <li>Akuntansi penerbit dan pemegang sukuk</li> </ul>	Pembahasan substansi pokok pengaturan standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>ED PSAK di triwulan pertama tahun 2025</li> <li>PSAK di triwulan kedua tahun 2025</li> </ul>

## DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DSAS IAI bertugas dan bertanggung jawab atas:

- Melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan SAK Syariah, Buletin Teknis Syariah, dan produk lain terkait SAK Syariah.
- Menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan SAK Syariah.

### DUE PROCESS PROCEDURES

DSAS IAI dalam melakukan penyusunan SAK Syariah mengikuti *due process procedures* yang ditetapkan oleh Peraturan Organisasi IAI. Proses penting tersebut meliputi identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar, melakukan riset, melakukan penulisan awal draf eksposur, pembahasan draf eksposur, pengesahan draf eksposur, publikasi draf eksposur, melakukan *public hearing*, dan pengesahan standar. SAK Syariah yang dipublikasikan seluruhnya disertai *covering letter* dari DSN-MUI.

### SUSUNAN



**Yasir (Ketua)**  
EY Indonesia



**Mohammad Bagus Teguh Perwira (Anggota)**  
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



**Gunawan Setyo Utomo (Anggota)**  
Ex-officio Otoritas Jasa Keuangan



**Prof. Muhammad Maksum (Anggota)**  
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



**Suhendar (Anggota)**  
Praktisi



**M. Dawud Arif Khan (Anggota)**  
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



**Abdul Rahmat (Anggota)**  
Ex-Officio Otoritas Jasa Keuangan



**Prof. Jaih Mubarak (Anggota)**  
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



**Alis Subiyantoro (Anggota)**  
Ex-Officio Otoritas Jasa Keuangan



**Fachmy Achmad (Anggota)**  
Bank BTPN Syariah



**Juni Supriyanto (Anggota)**  
Badan Pengelola Keuangan Haji



**Achmad Zaky (Anggota)**  
Universitas Brawijaya



**Herry Setiadie (Anggota)**  
PwC Indonesia



**Aulia Fitri Yustiardi (Anggota)**  
Ex-Officio Bank Indonesia



**Muhammad Gunawan Yasni (Anggota)**  
Praktisi



**Eko Wisnu Warsitosunu (Anggota)**  
Universitas Indonesia



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1  
Menteng, Jakarta  
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664  
Ext. 222/333/777